

BAB III

PEMIKIRAN JAMAL AL BANNA TENTANG RELASI AGAMA DAN NEGARA

A. Konsep Agama

Konsep agama merupakan sebuah doktrin, ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.²⁸ Dalam Bahasa arab sendiri agama diterjemahkan sebagai دين (*diin*)²⁹. Kemudian dalam jurnal yang berjudul Arab Spring: Islam dalam gerakan sosial dan demokrasi Timur Tengah karya Shafira Elnanda Yasmine mengungkapkan bahwa agama merupakan nilai-nilai kepercayaan, ritual, dan praktik-pratik agama dalam menjalankan revolusi dalam satu wadah gerakan sosial.

Jamal Al Banna dalam bukunya Pluralitas dalam Masyarakat Islam (2006:24) menerjemahkan Agama diibaratkan sebagai sebuah rumah yang besar, yang menampung paling tidak agama – agama bersaudara (Yahudi, Kristiani, Islam). Bagi masing – masing agama ini hendaknya memiliki peran serta ciri khasnya masing – masing, dan kesemuanya hendaknya bisa mencintai diri dan anak – anak mereka. Hal itu bukan berarti mesti membenci saudara yang lain serta anak – anak mereka. Dengan kata lain,

²⁸ KBBI Kemendikbud daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agama>)

²⁹ Kamus Al Maany daring (<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/agama/>)

cinta tidaklah hanya untuk diri dan anaknya saja. Cinta adalah sikap bisa menerima dan membahagiakan semuanya.

Dalam buku yang ditulis Jamal Al Banna yang berjudul *Ta'addudiyyah Fi Mujtama' Islami*, menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi landasan pemikiran pluralisme adalah paradigma tauhidik. Dalam tulisannya, Jamal menuliskan bahwasanya harapan, ajaran Islam yang fundamental ini relevan untuk menjawab tantangan zaman atau dalam bahasa ringkasnya menginginkan nilai-nilai keesaan (*tauhid*) menjadi basis nalar sosial budaya masyarakat Islam. Konsep tauhid ini menjawab bahwasanya konsep Allah sebagai Tuhan dan Dzat yang maha tunggal, maka entitas selainnya akan bersifat mejemuk, heterogen, plural dan tidak tunggal. Konsep agama yang diajarkan dalam Islam yang diimplementasikan dalam sejarah peradaban Islam itu sendiri tidak menyimpang dari peradaban kemanusiaan secara umum dan juga didukung dengan bukti sejarah Islam klasik, bahwasanya orang – orang yang memeluk agama Islam mampu dan bisa hidup berdampingan dengan orang-orang selain Islam.³⁰

Konsep agama sendiri dapat dijabarkan sebagai sebuah nilai – nilai tatanan spiritual yang bersifat abstrak yang ada didalam diri manusia, berkaitan dengan hubungan pribadi manusia dengan Tuhan kepercayaannya yang mana dapat menimbulkan ekses berupa gerakan – gerakan sosial didalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

commit to user

³⁰ <https://islami.co/mengamalkan-teologi-gamal-al-banna-di-tengah-pandemi/>

B. Konsep Negara

Negara merupakan sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, atau dapat disebut juga kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya dengan menerapkan asas kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan perseorangan.³¹ Dalam bahasa arab sendiri agama diterjemahkan sebagai البلاد (al-bilaad) yang berarti sebuah daerah atau negeri.³²

Dalam bukunya berjudul Arab Spring : Badai Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah, M. Agastya ABM mengungkapkan negara merupakan sebuah komponen dan elemen sosial di negara – negara Arab Spring yang terdiri dari kekuatan rakyat yang memiliki tujuan untuk melengserkan pemimpin negara yang bertindak diktator, otoriter, dan korup di wilayah kepemimpinannya masing – masing.

Pendapat dan pandangan Jamal Al Banna selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Dr. Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi yang mana juga didalam dalam buku Negara dan Kekuasaan dalam Islam yang ditulis oleh Jamal Al Banna mengatakan bahwa Negara adalah ketika masyarakat berkembang dan semakin berkembang, maka lahirlah Negara dan

³¹ KBBI Kemendikbud Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara>)

³² Kamus Al Munawwir Arab Indonesia, Ahmad Warson Munawwir, Pustaka Progressif Surabaya (1997)

berpindahlah semua kekhususan kekuasaan kebajikan yang mutlak kepada pemimpin Negara yang juga berperan sebagai seorang penguasa mutlak dalam negara, maka neraka pada saat itu adalah untuk masyarakat yang berada dalam kekuasaannya yang mutlak.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat tentang definisi negara dapat ditarik sebuah pengertian bahwasanya negara merupakan sebuah kesatuan komponen yang terdiri dari sebuah wilayah, rakyat sebagai warga negara penduduknya, yang keduanya saling berkesinambungan untuk saling memimpin dan dipimpin serta memiliki sebuah tujuan bersama untuk mewujudkannya.

C. Relasi Agama dan Negara

Para intelektual politik Islam menawarkan sebuah solusi untuk mengatasi kesenjangan yang ada dan solusi tersebut disesuaikan dengan beragamnya kondisi sosial politik yang dihadapi. Sebagaimana sejarah tentang korelasi antara agama dan negara ini dibuktikan dalam fenomena Arab Spring yang merupakan sebuah revolusi besar negara – negara di Timur Tengah yang dimulai pada tahun 2011. Dimulai dari negara Tunisia kemudian menjamur ke negara – negara tetangga seperti Mesir, Libya, Yaman, Suriah, dan Bahrain. Diantara salah satu penyebabnya adalah ketidakpuasan rakyat kepada sebuah pemimpin dalam mengemban amanah sebagai kepala negara yang dianggap otoriter, korup, diktator dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya peristiwa ini banyak dibumbui

dengan isu – isu agama yang dihembuskan kedalam lingkaran rakyat guna membakar semangat untuk menuntut pemimpin negara yang dianggap gagal dalam memimpin negara. Demikian pula digunakan oleh para pemimpin negara yang menggunakan dalih agama untuk mempertahankan kekuasaanya serta mengkonter arus demonstrasi rakyat yang menuntutnya.

Sekiranya terdapat tiga bagian mengenai pola hubungan agama dengan negara. Bagian pertama, sebuah konsep agar agama dengan negara bersatu. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*), di mana wilayah agama meliputi wilayah politik juga. Paradigma ini berpendapat bahwa negara merupakan lembaga politik dan sekaligus lembaga keagamaan. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan Ketuhanan (*divine sovereignty*). Sebagai contohnya yang menganut konsep ini adalah negara Iran dengan kelompok Syi'ah nya, dimana kekuasaan politik *imamah* hanya diwariskan kepada Rasulullah dan keturunannya saja (*ahl al-bait*).³³ Bagian kedua, memberikan penawaran sebuah konsep hubungan agama dan negara yang bersifat *sekularistik*. *Sekularistik* berarti hubungan agama terpisah dengan urusan dunia politik. Paradigma sekularistik menolak menjadikan Islam sebagai dasar penyelenggaraan negara atau paling tidak menolak determinasi Islam menjadi bentuk tertentu dari sebuah negara. Contoh dalam negara yang menggunakan ini adalah negara Turki saat kepemimpinan Musthafa

Kemal menerapkan prinsip dan konsep negara sekuler. Dalam pendapat didalam buku *Al Islam wa Ushul al-Hukm* karya Ali Abd al-Raziq berpendapat bahwa Islam tidak terkait dengan sistem pemerintahan atau kekhalifahan karena kekhalifahan Islam yang menjadi sejarah tersebut adalah sebuah sistem yang sifatnya duniawi, bukan lembaga keagamaan.³⁴

Bagian ketiga, berpendapat bahwa agama dan negara mempunyai hubungan yang bersifat simbiotik, yaitu hubungan timbal-balik dan saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara agar agama dapat berkembang dalam negara. Sebaliknya, negara membutuhkan agama untuk mengembangkan negara dengan bimbingan etika dan moral.³⁵

Bahwa unsur penting yang membedakan konsep negara dengan konsep umat adalah adanya pemerintahan. Umat telah ditemukan tanpa adanya pemerintahan, akan tetapi tidak dapat dibayangkan berdirinya sebuah negara tanpa adanya pemerintahan atau alat dan aparat yang melaksanakan tanggung jawab jalannya pemerintahan, ia tidak akan terealisasi kecuali dengan adanya sebuah kekuasaan. Kekuasaan adalah ikon khusus yang terdapat dalam suatu negara. Kekuasaan artinya adanya alat untuk mengekang atau memaksa yang mengharuskan patuh bagi para pelanggar.³⁶

Ketika mengatakan bahwa Islam adalah agama umat, dan bukan agama negara, sesungguhnya melihat bahwa negara sejatinya adalah

³⁴ Relasi Agama dan Negara, Jamal Al Banna. Hal 320

³⁵ Relasi Agama dan Negara, Jamal Al Banna. Hal 311
commit to user

³⁶ Relasi Agama dan Negara, Jamal Al Banna (2006:93)

kekuasaan dari sudut pandang prinsip, sejarah dan realitas. Sementara kekuasaan akan merusakkan ideologi, maka tidak akan terjadi percampuran antara keduanya. Tidak heran bahwa kekuasaan akan merusakkan ideologi karena ciri atau *tabiat* kekuasaan tidak hanya rusak akan tetapi ia juga merusak, dan tidak mungkin memperbaikinya. Realitas ini akan menjelaskan sesuatu hal yakni sebuah cara yang ditampilkan terkait hubungan agama dengan suatu negara.³⁷

Realitas hubungan antara agama dan sebuah negara ini akan menjelaskan tiga hal yang ditampilkan oleh negara. *Pendapat pertama*³⁸ seperti dalam sebuah gambaran yang telah dilalui oleh masyarakat pada sebuah masa, dimana mengenal sebuah pemahaman tentang konsep keluarga, baik dalam arti sempit ataupun makna secara luas. Dalam arti sempit dimana keluarga terdapat sebuah kepala keluarga yakni biasanya seorang Bapak atau Ayah yang memiliki peran dan posisi untuk memimpin, sedangkan arti luasnya adalah sekumpulan keluarga yang membentuk perkumpulan dinamakan *kabilah* dipimpin oleh kepala *kabilah* pula.

Demikian juga untuk pemahaman kekuasaan baik dalam bermasyarakat dan ruang lingkup keluarga, yang mana menyatakan bahwa kekuasaan kepala keluarga secara mutlak. Peran Bapak ini dalam satu waktu sebagai tuannya keluarga dan rajanya, hakim dan pakarnya dalam urusan-urusan agama, artinya bahwa Bapak keluarga adalah satu-satunya

³⁷ ibid³⁸ ibid

pemberi perintah dan larangan dengan tanpa boleh ditentang, ia yang mempunyai hak kekuasaan kebapakan yang mutlak, hak mati, hidup atas seluruh yang dibawah kekuasaanya. Ketika masyarakat berkembang dan semakin berkembang, maka lahirlah Negara dan berpindahlah semua kekhususan kekuasaan kebapakan yang mutlak kepada Pemimpin Negara yang juga berperan sebagai seorang penguasa mutlak dalam negara.

Pendapat kedua yaitu dengan sederhana dapat dikatakan bahwa negara akan muncul ketika terdapat tentara yang terlatih. Peran yang penting ini adalah yang akan akan diurus dan dijalankan oleh pemerintah, peran ini dalam realitasnya saat ini adalah mewakili tugas pemerintah yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa harus ada kekuasaan atau suatu kekuatan yang bisa yang mengharuskan dan menundukkan orang-orang untuk mematuhi dan melaksanakan perintah-perintahnya, harus terdapat alat atau aturan yang menggunakan kekuatan untuk menundukkan manusia untuk patuh, tunduk dan menepatinya atau komitmen terhadapnya.³⁹

Pendapat ketiga, bahwa ide-ide sosialis yang berbeda beda mempercayai bahwa negara adalah alat mengekang atau menundukkan yang diperintah oleh minoritas yang terorganisir dan bersenjata banyak serta mempunyai ciri khusus. Ide sosialis ini menawarkan alternatifnya

³⁹ Ibid, hal 95

yang dijemakan dalam ide partai dengan menganggapnya sebagai tentara sipil yang bergerak di bawah komando dua buah ide sosialisme.⁴⁰

Bahwa sebuah hubungan antara agama dan negara dapat ditarik pengertian terdapat beberapa konsep, yakni antara agama dan negara sangatlah berhubungan dan tidak dipisahkan, semua tatanan penyelenggaraan negara juga diatur oleh agama. Kemudian konsep yang selanjutnya adalah dimana antara agama dan negara tidak saling berhubungan, artinya sebuah negara tidak ikut campur dalam urusan agama warga negaranya dan juga sebaliknya. Kemudian yang paling ideal dengan beberapa pertimbangan dengan melihat realitas yang ditunjukkan oleh hubungan agama dan negara, faktor kepemimpinan, faktor kekuatan tentara, kemudian faktor kekuatan sosialis dengan ide partai sebagai wadah bermusyawarah maka konsep hubungan antara agama dan negara simbiotik atau saling berhubungan dirasa sangat ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan karakter warga negara yang ada didalamnya.

D. Peran Pemikiran

Peran pemikiran Jamal al-Banna tentang relasi antara agama dan negara dalam berbagai sektor yang berkaitan dengan kenegaraan dan kegamaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian penting yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

⁴⁰ Ibid, hal 104

1. Bidang Politik

Sebagai sebuah gerakan bahwa harus diakui, Ikhwanul Muslimin adalah gerakan dakwah yang besar, Ikhwan bukan seperti gerakan dakwah lain. Dalam memahami agama, Ikhwan tidak setengah-setengah. Tak mengherankan bila anggota Ikhwan hingga sekarang terus bertambah dan tak pernah mengalami kemandekan. Bukan berarti Ikhwan tanpa masalah. Sebagai oposisi, Ikhwan selalu ditindas pemerintah. Namun, karena Ikhwan memiliki jaringan yang kuat dan dukungan penuh dari masyarakat, pemerintah tak mampu menghentikan laju Ikhwan. Sekalipun Ikhwan merupakan organisasi besar, ia juga punya kekurangan. Kelemahan ikhwan adalah perubahan arah gerakan dari inklusif menjadi eksklusif, bahkan cenderung ekstrem, meski hal itu akibat besarnya represi pemerintah. Jamal Al Banna sebagai salah satu adik dari pendiri banyak belajar akan gerakan Ikhwan sehingga mengungkapkan bahwa antara cita – cita agama sebagai rahmat dan cita – cita negara harus selaras dan saling berkesinambungan, maka konsep penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Warga negara mendapatkan fasilitas dari negara dalam melaksanakan nilai – nilai keagamaan, dan agama memberikan

commit to user

layanan pembinaan karakter kepada negara melalui penduduknya dalam rangka mewujudkan cita – cita bersama.

2. Bidang Pendidikan dan Keilmuan

Latar belakang Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan yang notabene diisi oleh cendekiawan dan pemuda beserta mahasiswa yang konsen pada kajian dan ide pembaharuan islam dan didukung oleh pribadi Jamal Al Banna yang fokus dalam dunia kepenulisan melahirkan karya – karya fenomenal untuk dipelajari oleh generasi selanjutnya. Jamal Al Banna pada tahun 1953 mendirikan organisasi; "Masyarakat Mesir untuk Kepedulian bagi Napi dan Keluarganya". Organisasi tersebut tercatat pertama kali dan terdepan dalam kepedulian bagi pelayanan publik. Bersama saudara perempuannya, Fauziah, pada tahun 1997 dia mendirikan yayasan yang bergerak di bidang kebudayaan dan informasi Islam. Yayasannya itu memiliki perpustakaan yang menghimpun hampir lima ribuan buku dan menyimpan karya-karya langka termasuk dari India yang sudah berumur ratusan tahun. Begitu pula, menghimpun banyak dokumen dan manuskrip asli tulisan tangan tentang gerakan Ikhwanul Muslimin.⁴¹ Jadilah,

perpustakaannya menjadi sumber perburuan informasi yang unik bagi para peneliti.

3. Bidang Keagamaan

Gagasan pluralisme berparadigma tauhid yang diungkapkan serta sebagai wujud ijtihad Jamal Al Banna yang diungkapkan melalui buku – buku yang ditulisnya salah satu bukunya adalah Relasi Agama dan Negara. Hal ini merupakan salah satu manfaat dalam bidang keagamaan yakni mencoba membuka pandangan kepada warga negara khususnya yang memeluk islam bahwa ajaran islam yang fundamental sebenarnya relevan menjawab tantangan zaman. Tulisan – tulisan dan pemikiran Jamal Al Banna ini apabila dipelajari dengan seksama mampu mendorong warga negara yang beragama Islam khususnya untuk berfikir lebih luas dalam menyikapi agama sebagai kepercayaan dan aplikasinya didalam sebuah kehidupan sosial kemasyarakatan. Sehingga terhindar dari sikap – sikap tradisionalistik dan fundamental dalam memahami agama yang dapat menimbulkan sikap intoleran.